

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Periode 2017–2022)

Andi Mansur Yaas^{1*}, Otniel Safkaur², Maylen K.P Kambuaya³, Theo Allo Layuk⁴

^{1*234} *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*
Email: andimansuryaas@gmail.com

Abstract

This study aims to empirically prove the effect of the Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence (TKKD) in Regencies/Cities within the West Papua Provincial Government. The research population comprises the Budget Realization Reports (LRA) of all 13 Regencies/Cities in West Papua Province from 2017 to 2022. Using a census sampling method and eliminating outlier data (relying on Z-score criteria beyond the +2.5 to -2.5 range, which eliminated Sorong, Kaimana, and Maybrat regencies), a final sample of 60 observations was obtained from 10 regencies/cities across 6 years. The analysis tool utilizes a dynamic multiple linear regression model with SPSS version 27. The results of this study indicate that, partially, the Special Allocation Fund (DAK) has a positive but insignificant effect, the General Allocation Fund (DAU) has a negative and insignificant effect, and Capital Expenditure has a negative and insignificant effect on the Level of Regional Financial Independence (TKKD). Conversely, the Lagged Dependent Variable (LAG_Y) exhibits a highly significant positive partial effect. Simultaneously, DAK, DAU, Capital Expenditure, and LAG_Y have a highly significant joint effect on TKKD with an Adjusted R-Square value of 0.687, indicating that 68.7% of the variation in regional financial independence can be explained by the model, while the remaining 31.3% is influenced by other variables outside this model.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Level of Regional Financial Independence, West Papua.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) pada Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Papua Barat. Populasi penelitian mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari 13 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat selama periode 2017-2022. Dengan metode sensus sampling dan eliminasi data outlier (menggunakan kriteria Z-score di luar rentang +2.5 s.d -2.5 yang mengeliminasi Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Maybrat), diperoleh sampel akhir sebanyak 60 pengamatan dari 10 kabupaten/kota selama 6 tahun. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dinamis dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif tidak signifikan, dan Belanja Modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Sebaliknya, variabel Lagged Dependent Variable (LAG_Y) menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan secara parsial. Secara simultan, DAK, DAU, Belanja Modal, dan LAG_Y berpengaruh signifikan terhadap TKKD dengan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,687, yang mengindikasikan bahwa variasi kemandirian keuangan daerah mampu dijelaskan oleh model sebesar 68,7%, sementara sisanya sebesar 31,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Papua Barat.

Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang secara masif diimplementasikan sejak era reformasi melalui pemberlakuan otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan potensi ekonominya secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyerahan kewenangan mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek administrasi, aspek politik, dan aspek fiskal. Otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong kemandirian keuangan daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat.

Kajian terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah menjadi sangat mendesak dan relevan, terutama dalam rangka menyusun regulasi, menilai kualitas manajemen keuangan pemda, serta memastikan adanya dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Salah satu indikator yang paling krusial untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Rasio kemandirian ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri aktivitas operasional, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan transfer atau bantuan dari pemerintah pusat maupun pinjaman daerah (Putra & Hidayat, 2016). Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan otonomi daerah yang berjalan efektif, keputusan publik yang lebih demokratis, dan berkurangnya ketergantungan terhadap fiskal nasional.

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa perjalanan desentralisasi fiskal selama lebih dari dua dekade belum mampu mengantarkan sebagian besar daerah di Indonesia menuju gerbang kemandirian fiskal yang sesungguhnya. Sebagian besar pemerintah daerah masih berada dalam kategori tingkat kemandirian rendah sekali atau instruktif, di mana peranan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih sangat dominan. Hingga saat ini, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang benar-benar mandiri secara fiskal, sedangkan provinsi lainnya, khususnya di bagian timur Indonesia seperti Provinsi Papua Barat, menunjukkan potret ketergantungan fiskal yang sangat ekstrem. Berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) nasional tahun 2020 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021, dari total 503 pemda di Indonesia, terdapat 443 pemda (88%) yang masuk dalam kategori "Belum Mandiri".

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki otonomi khusus, namun kinerja kemandirian fiskalnya tergolong paling rendah secara nasional. Hal ini terlihat dari porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil terhadap total APBD kabupaten/kota di Papua Barat, yang secara rata-rata berkisar antara 2,94% hingga 4,6%, sangat jauh dibandingkan daerah maju di pulau Jawa. Di sisi lain, anggaran belanja kabupaten/kota di Papua Barat didominasi oleh belanja pegawai dan belanja operasional rutin yang didanai hampir

sepenuhnya dari transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, namun dalam praktiknya, sebagian besar DAU habis digunakan untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sehingga tidak tersedia ruang fiskal yang cukup untuk investasi publik (Wardhana, 2013). Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersifat *specific grant* ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus daerah sesuai prioritas nasional, namun seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan riil daerah, sehingga efektivitasnya dalam mendorong kapasitas fiskal lokal dan menciptakan PAD baru masih dipertanyakan.

Selain transfer dana perimbangan, instrumen belanja publik yang diharapkan mampu memicu kemandirian keuangan adalah Belanja Modal. Pengeluaran belanja modal ditujukan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan kesehatan. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, produktivitas ekonomi daerah diharapkan dapat meningkat, menarik minat investor, mempermudah mobilitas barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi lokal serta berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen PAD (Handayani & Erinos, 2020).

Meskipun hubungan teoretis menunjukkan bahwa DAK, DAU, dan Belanja Modal seharusnya memicu peningkatan kinerja ekonomi dan kemandirian fiskal, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten (inkonsistensi riset). Penelitian oleh Utari Handayani & NR (2020) di DIY menemukan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan DAK berpengaruh negatif signifikan, dan Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan. Di sisi lain, penelitian Azka (2022) pada daerah tertinggal menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif dan DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) ini memotivasi penulis untuk melakukan analisis empiris mendalam mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2017–2022.

Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*) Sektor Publik

Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang awalnya dikembangkan dalam konteks sektor korporasi oleh Jensen dan Meckling (1976), kini telah diterapkan secara luas dalam konteks organisasi sektor publik. Menurut Halim (2014), konsep keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak yang terjadi antara prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*). Dalam administrasi publik dan negara demokrasi, hubungan keagenan terwujud dalam beberapa tingkatan: pertama, antara masyarakat (sebagai *ultimate principal*) dengan lembaga legislatif/eksekutif; kedua, antara pemerintah pusat (sebagai prinsipal) dengan pemerintah daerah (sebagai agen) dalam konteks hubungan fiskal desentralisasi (Halim & Abdullah, 2006). Pemerintah daerah sebagai agen diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat (prinsipal) untuk mengelola sumber daya, pelayanan publik, dan menyusun anggaran daerah melalui APBD. Sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, agen memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana transfer (DAK, DAU) serta pelaksanaan Belanja Modal guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Namun, hubungan keagenan ini diwarnai oleh asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana pemerintah daerah (agen) memiliki pemahaman dan informasi yang lebih mendalam mengenai potensi, kebutuhan, serta masalah riil daerah dibandingkan pemerintah pusat (prinsipal) (Febriyanti & Mildawati, 2017). Adanya asimetri informasi ini dapat memicu konflik keagenan, di mana agen cenderung bertindak untuk kepentingan birokrasi lokal (seperti menaikkan anggaran belanja pegawai/operasional guna kepuasan internal) ketimbang mengoptimalkan penggalan potensi PAD demi tercapainya kemandirian fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah di Papua Barat dapat ditinjau sebagai manifestasi dari perilaku keagenan, di mana pemda lebih nyaman mengandalkan transfer pusat yang berisiko rendah daripada berupaya keras meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), DAK diklasifikasikan menjadi DAK Fisik (untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik) dan DAK Non-Fisik (untuk operasionalisasi layanan publik dasar, seperti Bantuan Operasional Sekolah/BOS). DAK dikategorikan sebagai *earmarked grant* (transfer spesifik) karena penggunaannya telah ditentukan secara kaku oleh pemerintah pusat, dan daerah diwajibkan menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (kecuali bagi daerah tertentu dengan kapasitas fiskal rendah). Tingginya porsi DAK berpotensi melemahkan kemandirian fiskal karena daerah tidak memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan lokal yang dinamis (Andjarwati et al., 2021).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN dengan tujuan utama meratakan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 12 Tahun 2019). Berbeda dengan DAK, DAU dikategorikan sebagai *block grant* (transfer umum) yang memberikan kebebasan (*discretion*) bagi pemda dalam penggunaannya. Formula alokasi DAU didasarkan pada celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Daerah dengan kapasitas fiskal rendah (seperti kabupaten/kota di Papua Barat) akan menerima alokasi DAU yang sangat besar. Ketersediaan DAU yang melimpah secara teori ditujukan agar pelayanan publik dasar dapat dipenuhi secara merata di seluruh pelosok tanah air. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dapat menciptakan efek psikologis "zona nyaman" bagi pemda, sehingga mengurangi intensif untuk memperluas basis perpajakan lokal (PAD).

Belanja Modal (BM)

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam APBD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Furqani & Titimmah, 2015). Aset tetap hasil belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan prasarana fisik lainnya yang digunakan oleh pemda dalam rangka pelayanan publik maupun operasional pemerintahan. Alokasi belanja modal yang produktif dan tepat sasaran sangat strategis karena memiliki *multiplier effect* dalam

menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran sarana infrastruktur jalan dan sarana pasar yang representatif akan menurunkan biaya transaksi ekonomi swasta, memacu investasi baru, yang secara akumulatif akan memperbesar basis pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Darwis, 2015).

Rumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu DAK ditujukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dasar daerah. Jika DAK dikelola dengan baik, daerah dapat membangun aset tetap produktif tanpa membebani PAD, sehingga ruang fiskal PAD dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang berkontribusi langsung bagi peningkatan retribusi lokal. Namun, DAK yang terlalu besar juga dapat memperkuat ketergantungan daerah kepada pusat.

H1: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Papua Barat.

Peningkatan DAU memberikan keleluasaan bagi pemda untuk mendanai operasional pemerintahan. Di satu sisi, DAU yang tinggi dapat mengurangi motivasi daerah dalam menggali potensi pajak daerah. Namun di sisi lain, DAU yang mencukupi menjamin stabilitas pelayanan dasar yang penting untuk mendukung iklim usaha lokal yang kondusif bagi pertumbuhan PAD.

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Papua Barat.

Realisasi belanja modal secara langsung meningkatkan kapasitas fisik daerah. Infrastruktur publik yang berkualitas tinggi merupakan faktor kunci utama dalam menstimulasi aktivitas sektor ekonomi kreatif, perdagangan, dan pariwisata daerah. Pertumbuhan sektor riil ini akan berdampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi retribusi dan pajak daerah, sehingga mendongkrak rasio kemandirian keuangan daerah.

H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Papua Barat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kotamadya, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD tahunan yang diperoleh secara resmi melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik

Indonesia (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>). Periode pengamatan riset mencakup rentang waktu selama 6 tahun berturut-turut, yaitu tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2022.

Populasi awal penelitian mencakup 13 kabupaten/kota dengan total observasi awal sebanyak 78 data (13 daerah x 6 tahun). Teknik penentuan sampel yang digunakan semula adalah sensus sampling (sampel jenuh). Namun, pada tahap pengolahan data awal, ditemukan sebaran data residual yang tidak berdistribusi normal karena adanya nilai pencilan (outliers). Guna memenuhi asumsi klasik regresi, peneliti melakukan eliminasi data pencilan dengan menggunakan kriteria Z-Score. Data observasi yang memiliki nilai Z-Score di luar rentang +2.5 dan -2.5 dieliminasi dari model analisis. Melalui prosedur ini, sebanyak 3 kabupaten terpaksa dieliminasi secara utuh dari sampel, yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Maybrat. Dengan demikian, jumlah sampel akhir penelitian yang memenuhi syarat analisis regresi adalah sebanyak 60 data observasi (10 kabupaten/kota x 6 tahun).

Tabel 2. Rangkuman Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian

1.	Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang terdaftar di DJPK Kemenkeu	13
2.	Kabupaten yang dieliminasi karena memiliki data pencilan (outlier)	(3)
3.	Jumlah Kabupaten/Kota terpilih sebagai sampel penelitian	10
4.	Jumlah Tahun Pengamatan (2017 s.d. 2022)	6 Tahun
Total	Jumlah Sampel Akhir Pengamatan (10 Kabupaten/Kota x 6 Tahun)	60 Observasi

Sumber: Data primer diolah oleh penulis (2024)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y), yang diukur dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total Pendapatan Daerah, dinyatakan dalam persentase (Halim, 2004). Variabel independen meliputi Dana Alokasi Khusus (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Belanja Modal (X3), yang masing-masing diukur berdasarkan nilai realisasi rupiah nominal tahunan yang tercantum dalam LRA APBD daerah bersangkutan. Guna mengendalikan masalah autokorelasi yang melekat pada data deret waktu panel (pooled time-series data), model penelitian ini dirumuskan secara dinamis dengan menyertakan Lagged Dependent Variable (LAG_Y), yaitu nilai variabel TKKD satu tahun sebelumnya (Y_{t-1}).

Model persamaan analisis regresi linear berganda dinamis yang diuji adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_1X1_t + b_2X2_t + b_3X3_t + b_4Y_{t-1} + e$$

Dimana:

Y_t = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) tahun

a = Konstanta

b_1 - b_4 = Koefisien regresi masing-masing variabel

$X1$ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$X2$ = Dana Alokasi Umum (DAU)

$X3$ = Belanja Modal (BM)

Y_{t-1} = Lagged Dependent Variable (LAG_Y)

e = Error term (kesalahan pengganggu).

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan memberikan deskripsi mengenai sebaran data variabel penelitian yang diamati melalui pengukuran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi dari 60 sampel observasi akhir yang lolos seleksi.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif (N = 60)

Variabel	N	Minimum (Rp / Rasio)	Maksimum (Rp / Rasio)	Rerata (Mean)	Standar Deviasi
DAK	60	52.870.813.735	287.098.475.358	142.615.423.670	51.931.733.552
DAU	60	316.998.031.000	696.155.450.223	486.505.301.781	106.367.628.538
Belanja Modal	60	113.361.380.245	1.308.678.122.691	308.333.081.305	212.150.612.108
TKKD (Y)	60	0,002 (0,20%)	0,098 (9,80%)	0,029 (2,94%)	0,022 (2,21%)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 27 (2024)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3, variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,02938 (atau 2,94%). Berdasarkan klasifikasi kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2004), nilai rerata ini berada jauh di bawah ambang batas 25%, yang menempatkan seluruh kabupaten/kota sampel di Provinsi Papua Barat dalam kategori tingkat kemandirian "Rendah Sekali" dengan pola hubungan "Instruktif". Artinya, peran pemerintah pusat melalui kucuran dana transfer sangat dominan dan mengendalikan hampir sepenuhnya jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan estimasi model regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna menjamin kelayakan estimator model regresi.

Uji Normalitas

Berdasarkan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,070 (lebih besar dari 0,05). Hal ini berarti data residual model berdistribusi normal, yang konsisten dengan tampilan grafis Histogram dan Normal P-Plot yang menunjukkan penyebaran titik-titik data residual merapat di sepanjang garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat korelasi antar-variabel independen dalam model regresi. Hal ini dibuktikan dari perolehan nilai Tolerance untuk seluruh variabel bebas yang berada jauh di atas angka 0,10, serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang berada di bawah angka 10. Secara rinci, nilai VIF untuk DAK adalah 1,466; DAU sebesar 1,358; Belanja Modal sebesar 1,313; dan LAG_Y sebesar 1,277.

Uji Heteroskedastisitas

Pengamatan visual terhadap grafik Scatterplot menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak dan merata baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola geometris tertentu (tidak mengelompok atau menyempit). Hal ini menyimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas (homoskedastisitas terpenuhi).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi diuji dengan membandingkan statistik Durbin-Watson (DW) model dengan nilai tabel DW. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai DW model adalah sebesar 1,961. Untuk sampel $N = 60$ dan $k = 4$ variabel bebas pada signifikansi 5%, batas bawah (dL) adalah 1,444 dan batas atas (dU) adalah 1,727. Karena nilai DW (1,961) berada dalam rentang dU s.d. 4 - dU ($1,727 < 1,961 < 2,273$), maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi (bebas dari autokorelasi).

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut disajikan tabel ringkasan hasil pengolahan regresi linear berganda dinamis:

Tabel 4. Hasil Estimasi Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Model / Variabel	Koefisien B	Std. Error	Beta	t-hitung	Signifikansi
(Konstanta)	0,103	0,228	-	0,452	0,653
DAK (X1)	2,879	3,527	0,072	0,816	0,418
DAU (X2)	-5,078	6,337	-0,068	-0,801	0,426
Belanja Modal (X3)	-0,593	2,611	-0,019	-0,227	0,821
LAG_Y (TKKD_t-1)	0,846	0,083	0,836	10,159	0,000*

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 27; *signifikan pada tingkat 1% (0,01)

Berdasarkan data koefisien regresi pada Tabel 4, diperoleh persamaan regresi unstandardized sebagai berikut:

$$\text{TKKD} = 0,103 + 2,879 \text{ DAK} - 5,078 \text{ DAU} - 0,593 \text{ BM} + 0,846 \text{ LAG_Y} + e$$

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) menghasilkan nilai F-hitung sebesar 33,385 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan LAG_Y berpengaruh sangat signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Papua Barat. Kekuatan penjelasan model dibuktikan dengan perolehan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,687. Hal ini bermakna bahwa kontribusi simultan variabel bebas tersebut

mampu menjelaskan 68,7% dari variasi naik turunnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara sisanya sebesar 31,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model analisis.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap TKKD (Hipotesis 1)

Hasil pengujian parsial (Uji t) pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel DAK memiliki koefisien regresi sebesar 2,879 dengan nilai t-hitung 0,816 dan signifikansi 0,418. Karena nilai signifikansi (0,418) jauh lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 5% (0,05), maka Hipotesis Pertama (H1) ditolak. Artinya, secara parsial, Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat.

Ketiadaan pengaruh signifikan ini mengindikasikan adanya asimetri fungsional dalam alokasi DAK. Sebagian besar alokasi DAK fisik di Papua Barat diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, sanitasi) dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional. Pembangunan fisik dasar ini, meski sangat vital bagi kesejahteraan sosial masyarakat, tidak memiliki dampak langsung jangka pendek yang dapat ditarik pajaknya atau menghasilkan retribusi daerah yang signifikan. Selain itu, ketergantungan pemda pada juknis (petunjuk teknis) DAK yang kaku dari kementerian pusat membatasi kreativitas pemda untuk memfokuskan alokasi dana pendukung bagi program inovatif penggalan PAD baru.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap TKKD (Hipotesis 2)

Hasil pengujian parsial menunjukkan variabel DAU memiliki koefisien regresi negatif sebesar -5,078 dengan nilai t-hitung -0,801 dan signifikansi 0,426. Nilai signifikansi (0,426) yang berada di atas 0,05 mengartikan bahwa Hipotesis Kedua (H2) ditolak. Artinya, secara parsial, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Papua Barat.

Hasil ini secara empiris memperkuat fenomena flypaper effect, di mana pemda merespon transfer block grant (DAU) secara asimetris. Ketersediaan DAU yang melimpah dan rutin setiap tahunnya membuat pemda tidak termotivasi (demotivasi) untuk mengoptimalkan penerimaan internal daerahnya (PAD). Sebagian besar DAU di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat terserap habis untuk membiayai belanja rutin aparatur sipil negara, seperti pembayaran gaji pegawai negeri daerah yang porsinya seringkali melebihi 50% dari total APBD. Hal ini menyisakan porsi yang sangat tidak memadai bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pariwisata, maupun peningkatan kapasitas manufaktur lokal yang sejatinya merupakan motor utama penggerak PAD jangka panjang.

Pengaruh Belanja Modal terhadap TKKD (Hipotesis 3)

Hasil pengujian parsial pada Tabel 4 menunjukkan variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar -0,593 dengan t-hitung sebesar -0,227 dan signifikansi 0,821. Nilai signifikansi (0,821) yang jauh melampaui alpha 5% (0,05) mengartikan bahwa Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. Secara parsial, Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.

Ketiadaan pengaruh signifikan ini tidak sejalan dengan teori ekonomi makro tradisional, namun dapat dipahami melalui beberapa karakteristik spesifik pembangunan di wilayah timur Indonesia. Pertama, adanya lag pembangunan (time lag). Investasi infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jembatan di Papua Barat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat dinikmati manfaat ekonominya secara penuh oleh pelaku bisnis, sehingga dampaknya terhadap pengenaan pajak daerah tidak dapat terukur secara instan dalam periode penelitian. Kedua, adanya masalah efisiensi alokasi belanja modal. Seringkali belanja modal yang digulirkan

bersifat konsumtif-pemerintah (seperti renovasi gedung kantor bupati, pengadaan kendaraan dinas mewah, gedung DPRD) yang tidak memiliki multiplier effect ekonomi swasta, melainkan justru menambah beban biaya pemeliharaan rutin pada tahun-tahun berikutnya yang harus ditutupi dari APBD.

Pengaruh Variabel Lagged Dependent Variable (LAG_Y)

Menariknya, variabel LAG_Y (kemandirian keuangan daerah tahun sebelumnya) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,846 dengan t-hitung sebesar 10,159 dan signifikansi sebesar 0,000 (sangat signifikan pada alpha 1%). Hal ini mengimplikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah di Provinsi Papua Barat bersifat inkremental-struktural. Tingkat kemandirian keuangan suatu kabupaten/kota hari ini ditentukan oleh kestabilan dan basis struktur ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Ketergantungan fiskal yang akut merupakan masalah struktural akumulatif yang tidak dapat diubah secara instan dengan sekadar mengubah besaran transfer tahun berjalan, melainkan memerlukan reformasi struktural pengelolaan aset daerah secara radikal.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Secara parsial, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2017–2022. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2017–2022. Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2017–2022. Secara simultan, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan TKKD tahun sebelumnya (LAG_Y) berpengaruh sangat signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Papua Barat, dengan kontribusi kekuatan penjelasan sebesar 68,7%.

Disarankan Bagi Pemerintah Daerah se-Papua Barat bahwa Perlu dilakukan reformasi perpajakan daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk meminimalisir kebocoran anggaran, serta melakukan diversifikasi sumber PAD dengan memetakan secara kreatif potensi unggulan daerah (seperti ekowisata Raja Ampat, perikanan, serta hilirisasi pertanian pala dan kakao). Bagi Pemerintah Pusat, Formula pengalokasian transfer (terutama DAU) ke daerah tertinggal perlu didesain secara insentif. Pusat dapat memberikan insentif fiskal berupa bonus transfer bagi daerah-daerah yang menunjukkan kenaikan persentase PAD signifikan secara konsisten. Bagi Pengelolaan Belanja Modal, Pemerintah daerah harus mengubah paradigma belanja modal dari konsumtif-birokrasi menjadi produktif-investasi publik. Alokasi belanja modal harus difokuskan pada sektor infrastruktur ekonomi strategis yang secara langsung membuka akses pasar bagi UMKM dan menurunkan biaya logistik sektor swasta. Bagi Akademisi/Peneliti Selanjutnya, penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan sampel wilayah pengamatan pada daerah-daerah otonomi khusus lainnya di Indonesia (seperti Aceh dan DIY) serta menguji variabel non-keuangan lainnya, seperti indeks tata kelola pemerintahan (Good Governance) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa sempitnya generalisasi hasil penelitian karena lokus penelitian hanya terbatas pada wilayah administratif Provinsi Papua Barat. Selain itu, model penelitian ini hanya berfokus pada instrumen keuangan APBD (DAK, DAU, BM) dengan total kontribusi penjelasan sebesar 68,7%, sehingga masih menyisakan 31,3%

variabilitas TKKD yang dipengaruhi oleh faktor lain yang belum terungkap dalam model riset ini.

Daftar Pustaka

- Andjarwati, M., Budiarti, E., Soemadijo, S., & Yasin, M. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 30-41.
- Azka, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia). *Jurnal Keuangan Sektor Publik*, 2(2), 45-56.
- Darwis, A. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Keuangan Sektor Publik*, 4(1), 12-25.
- Febriyanti, N., & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 112-126.
- Furqani, A., & Titimmah, S. (2015). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 14(2), 155-168.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Tinjauan Teoritis Penyusunan APBD. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(1), 53-69.
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 38–51. <https://doi.org/10.32493/skt.v1i4.1378>
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2016). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi DIY. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 89-105.
- Utari Handayani & NR. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 60-75.

Wardhana, A. (2013). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sektor Publik*, 11(2), 133-145.